

Judul : Darurat TPPO di Bulan Bung Karno
Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 8

8 SELASA, 20 JUNI 2023

OPINI

MEDIA
INDONESIA

Darurat TPPO di Bulan Bung Karno

Eva K Sundari
Institut Sarinah

MEMASUKI Bulan Bung Karno, Juni 2023, DPR masih menasung RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) yang sudah ditunggu-tunggu Sarinah. Meskipun DIM (daftar isian masalah) RUU PPRT sudah diterima DPR pada 16 Mei yang lalu, hingga hari ini pimpinan DPR belum juga melaporkannya ke Sidang Paripurna DPR RI.

Pembahasan RUU PPRT kembali disalip berbagai agenda lain yang datang lebih belakangan. Hingga 13 Juni 2023 yang lalu DPR sudah empat kali bersidang paripurna dan di Bulan Bung Karno DPR belum juga membahas para Sarinah. Semoga sebelum masa sidang ditutup pada 14 Juli mendatang, DPR sudah membentuk panitia dan mengesahkan UU PPRT untuk menjalankan ajaran Bung Karno.

Di masa lalu RUU PPRT usulan Baleg sempat tertahan selama 3,5 tahun di meja Ketua DPR sebelum diputuskan menjadi inisiatif DPR pada 21 Maret 2023. Selama itu, RUU PPRT disalip empat UU yang disahkan belakangan setelah RUU PPRT. Logika urat kacang yang selama ini menjadi tradisi DPR tidak diberlakukan pimpinan DPR.

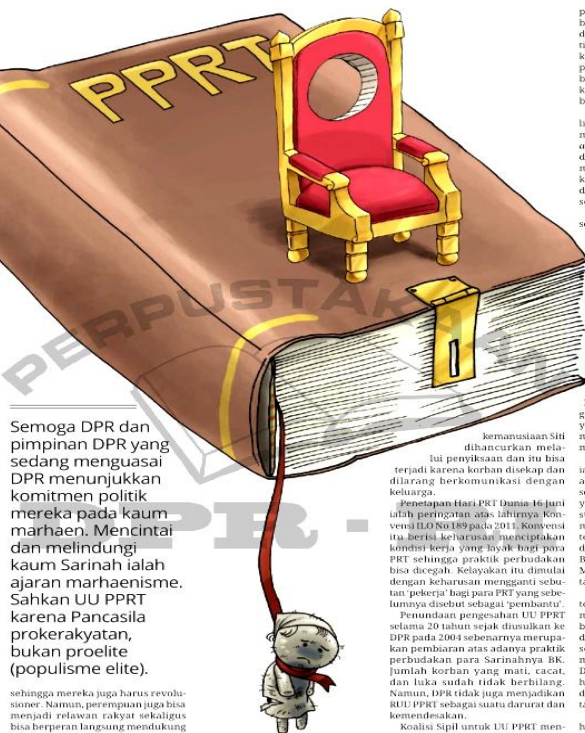
Selanjutnya, RUU PPRT yang bertujuan perlindungan kaum perempuan miskin itu tertunda selama 16 tahun karena tidak ada satu pun alat kelengkapan DPR mau menjadi inisiatif. Sungguh menyedihkan jika kemudian ada lagi penundaan di masa pimpinan DPR. Penungguan selama 20 tahun itu keterlambatan karena mengabaikan ribuan PRT korban terus berputaran.

Dalam buku *Sarinah*, Bung Karno menegaskan bahwa para Sarinah (perempuan Indonesia) ialah saka guru bangsa. Rendahnya status perempuan mencerminkan kualitas yang buruk dari pelaksanaan doktrin nasional demokrasi (sosio-demokrasi), yang merupakan sila ketiga dari Trisila BK. Sementara itu, perekonomian kita yang masih berstruktur dualisme berutang kepada para perempuan miskin ini sebagai penyangga ekonomi informal, termasuk ekonomi perawat (*care economy*).

Pada 16 Juni, Hari PRT Internasional yang bersamaan dengan Bulan Bung Karno harusnya menjadi saat yang tepat untuk melakukan reposisi terhadap sektor perawatan ekonomi. Selama ini, sektor informal tidak diurus negara sehingga bersifat eksploitatif dan berbahaya bagi perempuan. Negara diskriminatif terhadap sektor domestik, informal, dan ekonomi kerakyatan yang didominasi kaum perempuan.

Bung Karno menolak segregasi publik-domestik, keduanya terhubung, saling melengkapi sehingga kedudukan keduanya simetris alias berkesetaraan. Dalam kondisi yang sejajar demikian perempuan bebas keluar masuk atau berpindah tanpa dirugikan karena semua sektor bertujuan sama, yaitu kemakmuran bersama.

Perempuan Indonesia diharapkan BK untuk beradil. Ia bisa mendidik anak untuk revolusioner



Semoga DPR dan pimpinan DPR yang sedang menguasai DPR menunjukkan komitmen politik mereka pada kaum marhaen. Mencintai dan melindungi kaum Sarinah ialah ajaran marhaenisisme. Sahkan UU PPRT karena Pancasila prokerakyatan, bukan proelite (populisme elite).

sehingga mereka juga harus revolusioner. Namun, perempuan juga bisa menjadi relawan rakyat sekaligus bisa berperan langsung mendukung revolusi.

Sayangnya, pada Bulan Bung Karno tahun ini justru ada kondisi darurat tidak pidana perdagangan orang (TPPO) yang korban utamanya 80% ialah para Sarinah. Ada kiriman dua mayat PMI per hari dari luar negeri, kata Kepala BPSMI. Data dari Jala PRT juga menekankan bahwa hingga Juni 2023, 11 PRT di dalam negeri juga dilaporkan menjadi korban kekerasan yang hampir selalu ada unsur TPPO-nya juga.

Sayangnya, satgas-satgas yang dibentuk Kapoldi hanya berfokus pada TPPO untuk PMI yang akan ke luar dalam negeri (UU PPRT belum disahkan sangat mungkin menjadi alasan mengapa satgas TPPO tidak menargetkan pula praktik TPPO untuk PRT. Para korban TPPO ialah perempuan miskin, berprofesi PRT baik di dalam maupun di luar negeri.

Nasib PRT Siti Khotimah yang saat ini sedang berjuang mendapatkan

keadilan di PN Jakarta Selatan bisa memberikan gambaran nasib yang sama buruknya dengan para PMI. Ia disiksa beramai-ramai selama 1,5 bulan oleh sembilan orang karena keluarga pemberi kerja memaksa empat PRT lainnya untuk ikut menyiksa Siti.

Semua bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dialami Siti Khotimah. Kelaparan, dikuai fisik dan mental, diborgol, dan tidak di kandang anjing, dubur dan vagina dimasuki benda keras, serta dua kaki diletakkan di mendidih hingga dagingnya hilang dan perlu ditambah daging dari paha.

Penderita kota, Siti Khotimah mengalami perubahan modern. Ia diperlakukan layaknya bukan manusia bebas, melainkan direduksi sebagai benda milik pemberi kerja. Martabat

politik dalam gerakan sosial yang bertumpu pada konsep 'rakyat', tetapi diterjemahkan sesuai dengan kepentingan elite. Populisme mengabaikan wacana untuk menghilangkan pengaruh eksternal sehingga menimbulkan sentimen kelompok asli vs kelompok luar, misalnya, kelompok baik etnis maupun agama.

Pada praktiknya, politik populisme sering berwujud rasialisme, misalnya antitimor, anti-Islam, anti-hind sex yang diasosiasikan dengan kelompok minoritas dan miskin. Populisme itu wajah baru kolonialisme karena dibangun atas dasar relasi asimetris antarmasyarakat sehingga sangat feodalistis.

Politik populisme dikontrol elite sehingga diskriminasi, subordinasi, alienasi, eksploitasi, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya terhadap rakyat miskin merupakan strategi. Karena kelompok perempuan ada di strata paling bawah dari struktur sosial, perempuan miskin menjadi sasaran kebencian pula kelompok populis itu.

Perbudakan memang telah dilarang, tetapi di bawah sadard orang feodal masih menginginkannya dan itu dilakukan melalui praktik TPPO. Manusia hendaknya diperlakukan sebagai benda dan dieksploitasi tenaganya. Praktik dehumanisasi itulah yang ditentang Bung Karno dengan marhaenisemunya yang kemudian menjadi Pancasila.

Inti marhaenisme atau Pancasila ialah pembebasan kepada kerakyatan atau rakyat banyak (*people*), yang disebut kaum marhaen atau *musta'afin*, yaitu mereka yang tertindas secara struktural, dikalahkan sistem yang mereka tidak ikut membentuk. Sistem yang akhirnya mengeksploitasi dan memiskinkan orang miskin.

Bung Karno menunjukkan keses Pak Marhaen yang dimiskinkan sistem tanam paksa Belanda. Karena penyelesaiannya ialah sistem yang tidak adil, marhaenisme mengajak kita melawan sistem yang buruk melalui revolusi. Sistem harus dibongkar total dan ditata ulang agar sesuai prinsip keadilan sosial yang memenangkan kepentingan rakyat. Demikian terus-menerus dilakukan, hingga terbentuknya sosialisme Indonesia yang berisi kesetaraan dan tanpa eksploitasi.

Menurut Sukarno (1964), marhaenisme ialah ideologi yang berkeinginan menghilangkan penindasan, penganiayaan, pemerasan, dan pengisapan serta mengingkarkan adanya masyarakat yang adil dan makmur melalui kemerdekaan nasional dengan adanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Karena itu, Bulan Bung Karno sepatutnya menjadi momentum untuk merestorasi sistem agar tercipta demokrasi politik yang berkeadilan sosial. Glorifikasi pemikiran pemikiran BK tanpa melaksanakan ajarannya tidak akan membawa perubahan-perubahan dan justru menghilangkan warak progresif marhaenisme/Pancasila.

Semoga DPR dan pimpinan DPR yang sedang menguasai DPR menunjukkan komitmen politik mereka pada kaum marhaen. Mencintai dan melindungi kaum Sarinah ialah ajaran marhaenisisme. Sahkan UU PRT karena Pancasila prokerakyatan, bukan proelite (populisme elite).

Marhaenisme vs politik populisme

Menguatnya politik populisme yang antikelompok miskin memang sedang mendominasi politik global. Politisi aliran kanan itu terutama berkembang di Eropa Barat dan di Asia. Populisme merupakan wacana